



Banyak Desa Belum Siap Manfaatkan Dana Desa

Mangupura (Bali Post) -

Dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat, belum sepenuhnya terserap di Kabupaten Badung. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Kementerian Keuangan RI mencatat, dari pagu Rp 13.826.342.000, realisasi transfer dana desa di Gumi Keris telah mencapai 11.061.073.600 atau mencapai 80 persen dari alokasi di APBN 2015.

"Dana desa tersebut saat ini 80 persen sudah ditransfer ke daerah dan berada di kabupaten. Mungkin dari kas daerah ke rekening desa masih ada hambatan, karena masih banyak desa yang belum siap menerima dana desa dan memanfaatkannya," ujar Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Bali Kementerian Keuangan RI R. Wiwin Istanti, belum lama ini.

Menurutnya, sebagian besar belum dicairkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa, karena masih banyak kepala desa maupun perangkatnya yang belum siap memanfaatkannya. "Memang untuk dapat menyerap dana desa tersebut, diperlukan kesiapan desa sehingga tidak terjadi penyiangan," katanya.

Kendati pihaknya mendorong agar dana yang tersedia cepat terealisasi, namun dia menegaskan dana desa tersebut harus terus dikawal sampai tingkat pemanfaatannya di desa, sehingga dapat terserap dengan baik. "Kalau dana desa masih tersimpan di kas daerah atau di reken-

ing desa, maka artinya belum terserap," ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Bupati Badung Nyoman Harry Yudha Saka menyebutkan, selain dari APBN, Pemkab Badung juga menganggarkan dana desa pada APBD Induk 2015 yang dirancang Rp 5.734.370.822. Sedangkan pada APBD Perubahan dirancang naik menjadi Rp 13.826.342.000. "Dengan demikian, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah desa pada APBD Induk dan Perubahan tahun 2015 sebesar Rp 327.046.602.394," ujarnya sembari menyebutkan, desa yang mendapatkan alokasi dana terbesar adalah Desa Dalung Rp 9.854.593.987,15 dan yang terkecil adalah Desa Selat Rp 4.841.395.539,24. (kmb27)



Benahi Infrastruktur, Digelontor Rp 200 Miliar✓

Tabanan (Bali Post) -

Perhatian pemerintah pusat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan di Kabupaten Tabanan cukup tinggi. Terbukti dengan digelontorkannya anggaran Rp 200 miliar lebih, guna membenahi infrastruktur. Hal ini disampaikan calon Wakil Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya yang berpasangan dengan calon Bupati Ni Putu Eka Wiryastuti, saat bertatap muka dengan ratusan warga Desa Wangaya, Kecamatan Penebel, Rabu (23/9) lalu.

Di hadapan tokoh masyarakat, bendesa adat, perbekel, anggota DPRD Tabanan Nyoman Arnawa, Wayan Tamba, dan Ketua Tim Pemenangan Eka-Jaya, I Made Dirga, Sanjaya memohon doa restu dan meminta masyarakat mendukung pilkada pada 9 Desember mendatang agar berjalan aman dan baik.

Sanjaya bersama Cabup Eka yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar, selama memimpin lima tahun terakhir, membantu memfasilitasi masyarakat lewat program-program pro rakyat demi keberlangsungan budaya dan agama. Hampir 75% waktunya dihabiskan untuk turun ke masyarakat guna me-yadnya, serta mendengarkan aspirasi rakyat yang sebenarnya.

Di bagian lain, Sanjaya menegaskan, jika kembali dipercaya memimpin Tabanan, pada pertengahan 2017 akan memperjuangkan agar jalan-jalan dihotmik. "Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat karena dalam pilpres tahun lalu sudah memilih Bapak Jokowi

sebagai Presiden RI," katanya. Pilihan masyarakat itu tidak keliru, sebab pemerintah Kabupaten Tabanan merasakan langsung manfaat dari dukungan dan perhatian pemerintah pusat. "Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur di Tabanan diperhatikan dengan dukungan anggaran pusat mencapai Rp 200 miliar," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Gede Manuardana mewakili masyarakat mengajak semeton kebayan di Kabupaten Tabanan memilih Eka-Jaya pada pilkada mendatang, karena sudah terbukti berhasil memimpin daerah lumbung pangannya Bali. Kepemimpinan Eka-Jaya lima tahun ini cukup bagus lewat tindakan nyata dalam bentuk bantuan dan program seperti GIS dan partisipatif.

Dukungan penuh untuk Eka-Jaya juga disampaikan

warga Banjar Kelembang, Pacut, Rejasa Kaja, dan Rejasa Kelod. Di banjar ini Eka Wiryastuti hadir membaaur bersama warga. Gede Wayan Wiasta mewakili masyarakat menyampaikan apresiasi dan bangga atas kehadiran Cabup Eka dalam persembahyangan bersama. "Kami sudah banyak menerima bantuan baik untuk subak maupun dinas," ungkapnya.

Tokoh PDI-P Nyoman Adi Wiryatama meminta pemerintah dan masyarakat bersatu. Pelan tapi pasti semua masalah bisa diselesaikan. Cabup Eka Wiryastuti mengharapkan hubungan pemerintah dan masyarakat yang sudah baik dilanjutkan kembali. Eka juga minta masyarakat tidak golput, agar pilkada berjalan baik dan tercipta Tabanan yang serasi.

(kmb28)



Bali Post/kmb288

DUKUNG - Ratusan warga Rejasa Kelod, Penebel, siap mendukung Eka-Jaya dalam Pilkada Tabanan, Desember mendatang.



Genjot PAD

Disosnaker "Buru" Naker Asing

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) akan menggenjot secara maksimal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan tenaga kerja (naker) asing yang bekerja di Badung, terutama di sektor pariwisata. Bahkan, instansi ini mengharuskan naker asing mendaftarkan dan mengantongi izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).

Kepala Disosnaker Badung I.B. Oka Dirga belum lama ini mengatakan, perusahaan yang memakai jasa orang asing cukup banyak di Badung. Biasanya mereka bergerak di bidang pariwisata seperti hotel dan restoran. "Semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja orang asing wajib memiliki izin, yaitu berupa izin mempekerjakan tenaga kerja asing alias IMTA. Kalau tidak artinya mereka memakai tenaga kerja ilegal,"

tegasnya.

Menurutnya, keberadaan naker asing ini kebanyakan menduduki posisi strategis di sebuah perusahaan, seperti *general manager* dan sebagainya. Posisi naker asing ini bahkan kerap di atas naker lokal. "Memang tenaga kerja asing pasti pegang posisi bagus. Makanya, kami imbau perusahaan agar tenaga kerja asing didampingi oleh orang lokal. Jangan sampai kita diatur-atur sepenuhnya oleh orang luar," ungkapnya.

Lebih jauh diterangkannya, Pemkab Badung tahun 2015 menargetkan 300 naker asing yang bekerja di perusahaan di Badung. Target tersebut diyakini terealisasi. Sebab, per bulan Agustus lalu jumlah naker asing yang terdaftar mengantongi IMTA telah mencapai 235 orang. "Target kita 300 tenaga kerja asing di Badung. Apalagi melihat jumlah sekarang (naker asing terdaftar -red), kemungkinan

bisa lebih dari itu," ujarnya optimis.

Kendati demikian, Oka Dirga mengakui jika pemerintah tidak dapat melarang warga asing bekerja di Badung, terlebih dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Asalkan yang bersangkutan bekerja secara legal.

"IMTA diterbitkan oleh pemerintah pusat, kami di daerah sifatnya hanya memberi perpanjangan saja," ucapnya seraya menyebutkan, retribusi naker asing kepada pemerintah daerah melalui perpanjangan IMTA wajib membayar 100 dolar per bulan.

Terkait dugaan adanya naker asing ilegal di Badung, pejabat asal Abiansemai itu menegaskan, semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib terdaftar. "Dan kami juga imbau mereka agar mendaftarkan kalau mempekerjakan orang asing," pungkasnya. (kmb27)



Bali Post/kmb38

ABRASI - Abrasi pantai masih menjadi persoalan serius dan belum mendapatkan program penanganan optimal.

Penanganan Abrasi Terganjil Anggaran

Singaraja (Bali Post) -

Buleleng memiliki kawasan pantai terpanjang di Bali. Tampaknya memerlukan anggaran besar untuk menangani kerusakan pantai akibat abrasi tersebut. Dari panjang total pantai 157 kilometer, tahun ini lebih 44 kilometer bibir pantainya mengalami abrasi parah. Kerusakan pantai telah tertangani sekitar 37 kilometer. Celakanya, abrasi yang sudah tertangani dengan berbagai konstruksi senderan beton biasa, hingga armor (pasangan batu berukuran besar, red) kini kembali mengalami kerusakan. Sementara alokasi anggaran dari APBD Buleleng tergolong minim, sehingga program penanganan abrasi di pantai utara (pantura) Bali ini sepertinya belum berjalan optimal.

Data yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, konstruksi penanganan abrasi yang paling parah terjadi di pantai Buleleng Timur. Lokasinya seperti di Desa Penuktukan dan Desa Sembiran, Tejakula. Beton penahan ombak di bagian bawah mulai hancur. Hal itu akibat hempasan gelombang. Diperkirakan, kerusakan penahan ombak di pantai ini pan-

jangnya sekitar 55 meter. Sedangkan di Desa Sembiran kerusakan yang sama diperkirakan panjangnya lebih dari 380 km. Jika kerusakan ini tidak segera mendapatkan penanganan serius, dikhawatirkan kerusakannya bertambah parah. Hal ini karena setiap akhir tahun hingga di awal tahun pantura Bali sudah jadi langganan gelombang pasang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nyoman Gede Suryawan ketika dimintai konfirmasi membenarkan jika penanganan abrasi di daerahnya masih mengalami hambatan, akibat kemampuan anggaran dari APBD bisa terbilang kecil. Pemkab Buleleng sendiri berupaya mengajukan permohonan dana bantuan ke pemerintah provinsi maupun ke pusat. Sayangnya, usulan itu belum membuahkan hasil optimal. Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida yang dikucurkan ke Buleleng umumnya, proyek lanjutan seperti di Desa Patas, Gerogak dan Desa Kalisada, Seririt. Kedua proyek lanjutan ini volume pekerjaannya sekitar 700 meter. Nilai proyeknya lebih dari Rp 5,8 miliar. (kmb38)

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 11



Bali Post/kmb38

ABRASI - Abrasi pantai masih menjadi persoalan serius dan belum mendapatkan program penanganan optimal.

Penanganan Abrasi Terganjil Anggaran

Singaraja (Bali Post) -

Buleleng memiliki kawasan pantai terpanjang di Bali. Tampaknya memerlukan anggaran besar untuk menangani kerusakan pantai akibat abrasi tersebut. Dari panjang total pantai 157 kilometer, tahun ini lebih 44 kilometer bibir pantainya mengalami abrasi parah. Kerusakan pantai telah tertangani sekitar 37 kilometer. Celaknya, abrasi yang sudah tertangani dengan berbagai konstruksi senderan beton biasa, hingga armor (pasangan batu berukuran besar, red) kini kembali mengalami kerusakan. Sementara alokasi anggaran dari APBD Buleleng tergolong minim, sehingga program penanganan abrasi di pantai utara (pantura) Bali ini sepertinya belum berjalan optimal.

Data yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, konstruksi penanganan abrasi yang paling parah terjadi di pantai Buleleng Timur. Lokasinya seperti di Desa Penuktukan dan Desa Sembiran, Tejakula. Beton penahan ombak di bagian bawah mulai hancur. Hal itu akibat hempasan gelombang. Diperkirakan, kerusakan penahan ombak di pantai ini pan-

jangnya sekitar 55 meter. Sedangkan di Desa Sembiran kerusakan yang sama diperkirakan panjangnya lebih dari 380 km. Jika kerusakan ini tidak segera mendapatkan penanganan serius, dikhawatirkan kerusakannya bertambah parah. Hal ini karena setiap akhir tahun hingga di awal tahun pantura Bali sudah jadi langganan gelombang pasang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Nyoman Gede Suryawan ketika dimintai konfirmasi membenarkan jika penanganan abrasi di daerahnya masih mengalami hambatan, akibat kemampuan anggaran dari APBD bisa terbilang kecil. Pemkab Buleleng sendiri berupaya mengajukan permohonan dana bantuan ke pemerintah provinsi maupun ke pusat. Sayangnya, usulan itu belum membuahkan hasil optimal. Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida yang dikucurkan ke Buleleng umumnya, proyek lanjutan seperti di Desa Patas, Gerogak dan Desa Kalisada, Seririt. Kedua proyek lanjutan ini volume pekerjaannya sekitar 700 meter. Nilai proyeknya lebih dari Rp 5,8 miliar. (kmb38)

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 11



RAPBD Bali 2016

Anggaran Pendidikan Hanya 19,07 Persen

Denpasar (Bali Post) -

DPRD Provinsi Bali menyoroti alokasi anggaran pendidikan yang hanya 19,07 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bali 2016. Alokasi ini dinilai belum memenuhi isi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasalnya, Undang-undang Sisdiknas telah mengamanatkan agar dana pendidikan harus minimal 20 persen atau tidak boleh kurang dari itu.

"Kami mengharapkan agar ditetapkan sebesar 20 persen dari total APBD. Jika angka 20 persen bisa ditetapkan untuk fungsi pendidikan, maka akan ada tambahan alokasi dana lebih dari Rp 50 miliar masuk ke SKPD terkait," ujar anggota Fraksi Golkar DPRD Bali I.B. Gede Udiyana, S.T. dalam rapat paripurna Dewan, belum lama ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Bali I Ketut Agus Mas Sewi Putra, S.H. menyatakan, alokasi anggaran pendidikan yang dirancang gubernur tidak saja bertentangan dengan Undang-undang Sisdiknas, tetapi juga UUD 1945 tepatnya Pasal 31 ayat (4) Amandemen ke-4 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No: 013/PUU-VI/2008 tanggal 13 Agustus 2008. "Alokasi anggaran fungsi pendidikan yang tidak mencapai minimal 20 persen dari total APBD 2016 akan menyebabkan Perda APBD Pemprov Bali Tahun Anggaran 2016 berpotensi besar ditolak oleh Mendagri," ujarnya. Akibatnya, lanjut Agus, Pemprov Bali harus membahas ulang APBD itu. Sementara pembahasan ulang membutuhkan waktu yang lama dan bisa menyebabkan program pembangunan menjadi terbengkalai. (kmb32)



Bali Post



Satpol PP

Hentikan Penggalian

Tanah di Tamblingan

Singaraja (Bali Post) -

Kasat Pol. PP Kabupaten Buleleng Drs. Made Budiastawa, M.Si. bersama belasan anggota melakukan sidak, berikut menyegel proyek galian tanah di lingkungan Dusun Tamblingan Desa Munduk Kecamatan Banjar, Buleleng. Petugas telah berulang kali memperingati dan melarang proyek tersebut, karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan ekosistem, khususnya di daerah resapan air.

Satpol PP untuk ketiga kalinya datang memberi peringatan. Satpol PP telah melarang keras dilakukan aktivitas penggalian di kawasan resapan air. "Luas tanah galian itu mencapai satu hektar, kemudian kami

segel karena memang tidak diperbolehkan melakukan penggalian di kawasan tergolong daerah resapan air.

Sewaktu kami datang pertama kali, mereka janji menyetop kegiatan penggalian. Hingga tiga kali

peringatan tidak dindahkan, ya terpaksa kami segel," ujar Budiastawa saat dikonfirmasi *Bali Post*, Rabu (23/9) lalu.

Tindakan peringatan Satpol PP Buleleng dilakukan berdasarkan Perda Nomor

2 Tahun 2012 tentang Perizinan, juga mengacu Perda 6 Tahun 2009 tentang Kertibatan Umum. Sejumlah personel terlibat didampingi pihak Kecamatan Banjar, Desa Munduk, didukung unsur keamanan dari TNI/Polri.

Budiastawa menjelaskan, pemilik proyek informasinya berasal dari Gianyar. Satpol PP belum menemukan pihak bersangkutan. Penyegelel alat berat terpaksa dilakukan. (kmb34)

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 7



Bali Post



Tanpa SPPT, Bayar Pajak dengan NOP

Tabanan (Bali Post) -

Peran aktif masyarakat sangat diperlukan, untuk mencapai target pajak daerah yang ditetapkan Rp 84 miliar pada 2015. Pasalnya, pajak daerah sangat berkontribusi untuk meningkatkan PAD sekaligus pembangunan Kabupaten Tabanan ke depan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan masih banyak wajib pajak tidak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dari pemerintah. Masyarakat pun menjadi kebingungan, karena tidak tahu bagaimana caranya membayar pajak. Akibatnya, banyak para wajib pajak memilih tidak membayar kewajibannya.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendapatan dan Pese-dahan Agung Kabupaten Ta-banan mengeluarkan kebi-jakan, bahwa para wajib pajak yang tidak mendapat SPPT masih bisa melaksanakan ke-wajibannya membayar pajak, asal mengetahui Nomor Objek Pajak (NOP). "Masyarakat yang memiliki NOP dengan kode angka terakhir 0, bisa bayar pajak tanpa SPPT. Kecuali, jika ada transaksi seperti jual beli tanah, baru perlu SPPT baru dan bukti pelunasan pajak," jelasnya belum lama ini.

Kebijakan ini disampai-kannya agar jangan sampai gara-gara menunggu ter-bitnya SPPT masyarakat terkena denda akibat terlamb-at membayar pajak. Keter-lambatan penerbitan SPPT dikarenakan ribuan pemohon masih dalam antrean, baik itu pendaftar baru, mutasi, maupun pemecahan sejak wewenang ini dilimpahkan ke Pemda. "Sebenarnya, pros-es penanganan tidak lebih dari 30 menit. Hanya karena masih menangani pemohon sebelumnya yang jumlahnya ribuan, otomatis masyarakat yang baru masuk berada pada antrean selanjutnya," ucapnya.

Apalagi dengan jumlah SDM dan jam kerja yang ada,

dalam sehari hanya bisa me-nangani 30-40 SPPT. "Meski demikian, jumlah yang ribuan ini terus kami upayakan agar cepat ditangani. Karena dari ke hari ada pemohon baru yang menambah daftar antrean. Jadi, tidak bisa masyarakat yang baru masuk langsung bisa kami tangani," katanya. Sudarma mengakui, selama ini masih banyak masyarakat menunggu terbitnya SPPT dulu sebelum membayar pa-jak. "Kami tidak bisa me-nyalahkan, kemungkinan mereka disibukkan dengan ak-tivitas pekerjaan sehari-hari, sehingga lupa bayar pajak. Tetapi kami tetap mengimbau agar para wajib pajak melak-sanakan kewajibannya, kar-ena ini untuk pembangunan Tabanan," ungkapnya.

Pajak daerah sangat berkontribusi untuk pening-katan PAD. Dari 11 pajak yang dilimpahkan ke daerah, sembilan komponen setor wa-jib pajak telah memberikan kontribusi yang sangat tinggi. Dari tahun ke tahun pajak Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyumbang PAD terbesar. "Tahun ini saja sampai Agus-tus, pajak BPHTB sudah teral-isasi 90% dari target Rp 25 miliar. Disusul pajak hotel dan pajak penerangan jalan," jelas Sudarma. (kmb28)

Edisi : Jumat, 25 September 2015

Hal : 14



Bali Post



Tekan Kebocoran PAD Dewan Dukung Penerapan

Tiket Elektronik

Bangli (Bali Post)-

Keinginan Penjabat (Pj) Bupati Bangli Dewa Mahendra Putra menerapkan sistem tiket elektronik guna menekan kebocoran pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kintamani, mendapat dukungan sejumlah anggota dewan. Hanya, dewan berpendapat keinginan tersebut harus disertai dengan kajian yang matang.

Sementara itu, mengingat kondisi keuangan daerah Bangli yang masih sangat minim, maka langkah pembenahan yang sebaiknya dilakukan Pemkab saat ini, pascakemunculan video Pungli Mafia Ticket di Kintamani di situs *Youtube* adalah dengan meningkatkan pengawasan serta pembinaan terhadap para petugas pungut.

Anggota Komisi II DPRD Bangli Wayan Jamin, Minggu (20/9) lalu, menilai keinginan Pj. Bupati untuk menerapkan sistem tiket elektronik sangat tepat. Sebab, dengan diterapkannya

sistem tersebut maka praktik curang yang mungkin dilakukan oleh oknum petugas nakal bisa dicegah. Demikian juga tingkat kebocoran dari pemungutan tiket pariwisata di Kintamani diyakininya akan dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Jamin, belum adanya jalur khusus yang bisa digunakan untuk memungut retribusi pariwisata. Sebenarnya bukanlah menjadi kendala besar untuk menerapkan sistem tiket elektronik. Sistem ini bisa diterapkan, asalkan tetap disertai dengan pengawasan yang

maksimal. "Misalnya ada sebuah kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Kalau kendaraan itu mengatakan dia akan ke Singaraja, tapi ternyata dia berhenti untuk menikmati pemandangan di Kintamani maka tim pengawas itu akan bekerja. Kalau memang dia berhenti di Kintamani, maka di sanalah kita kenakan tiket," terangnya.

Hanya, diakuinya, yang menjadi kendala untuk bisa menerapkan sistem tersebut adalah soal anggaran. Di mana anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan tiket elektronik tersebut

tentunya tidaklah sedikit. "Oleh karenanya, untuk saat ini yang perlu dibenahi adalah sistem kontrol di lapangan. Pengawas yang selama ini ditugaskan di setiap pos pungut harus betul-betul bisa mengawasi," terangnya.

Senada dengan Jamin, anggota Komisi II Nyoman Gelgel Wisnawa juga sangat mendukung penerapan sistem tiket elektronik ini. Hanya sebelum hal itu diterapkan, harus dilakukan kajian yang matang, selain tentunya menyediakan

anggaran untuk itu. Menurut Gelgel, untuk jangka pendek maka yang harus dilakukan Pemkab saat ini adalah melakukan pembinaan terhadap petugas pungut yang ada. "Pembinaan terhadap petugas

ini harus dilakukan secara kontinu," terangnya.

Di samping itu, untuk mencegah terjadinya praktik curang dalam pemungutan yang juga harus diperhatikan adalah meningkatkan kesejahteraan para petugas pungut. Di mana dari hasil sidak Komisi II beberapa waktu lalu, diketahui upah yang selama ini diterima para petugas pungut di Kintamani masih jauh di bawah UMR yakni hanya Rp 600 ribu. "Faktor ini juga hendaknya diperhatikan pemerintah. Karena dengan upah Rp 600 ribu per bulan bagaimana bisa mereka mencukupi kehidupannya. Kurangnya kesejahteraan inilah yang membuka peluang terjadinya praktik tersebut," kata Gelgel. (kmb40)

Edisi : Jum'at, 25 September 2015

Hal : 8